

## PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: Ikon Baru Politik Indonesia



**Kamarudin**

Penulis adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UI dan peneliti AKSES Research Indonesia.

S ehari setelah pencoblosan kertas suara Pemilu legislatif 5 April 2004, media massa nasional mengungkap peta baru kekuatan politik, dengan sang bintang PK Sejahtera dan Partai Demokrat. *Harian Kompas* memajang judul headline, "PDI-P Masih Teratas: Partai Demokrat dan PKS Menyodok", *Republika* menulis, "Raihan Suara Partai Baru Melejit", dan editorial *Media Indonesia* tampil dengan judul memikat, "Dua

Bintang Baru di Hari Pertama". Penabalan itu disampirkan kepada kedua partai ini karena prestasi spektakuler mereka dalam merobohkan dominasi PDI Perjuangan, Partai Golkar, serta partai stok lama lainnya di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terpantau para jurnalis.

Pelbagai judul di media massa nasional itu ibarat pertanda awal bakal muncul ikon politik baru di tanah air melalui pentas pemilu 2004 kali ini. Dan prediksi media massa akhirnya tak meleset. Partai Demokrat menerobos ke lingkaran "the big of five", disusul PK Sejahtera. Bahkan PK Sejahtera di luar dugaan menyodok ke urutan pertama di tempat yang paling prestisius (DKI Jakarta).<sup>1</sup> Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilu legislatif pada tanggal 5 Mei 2004, PK Sejahtera yang pada pemilu 1999 bernama Partai Keadilan dan harus terganjal jerat *electoral threshold* 2% (7 kursi di DPR RI) mencetak prestasi spektakuler: meraup lonjakan kursi DPR RI sebanyak lebih dari enam ratus persen (lihat tabel).<sup>2</sup> PK Sejahtera mengkolleksi 45 kursi di DPR RI yang

<sup>1</sup> Lihat Kamarudin, "Makna Keperkasaaan PK Sejahtera di DKI Jakarta", Majalah SAKSI No 13 Tahun VI 28 April 2004.

<sup>2</sup> Dari tujuh partai Islam yang berlaga pada pemilu kali ini, tiga partai mengalami penurunan dukungan suara (PPP, PKB, dan PAN) dan tiga partai politik lainnya meningkat, yakni PKS, PBB, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Satu partai lagi adalah pendatang baru, yaitu Partai

disumbangkan oleh 8.325.020 suara pemilih, dibandingkan dengan dukungan atas partai dakwah –sebuah istilah yang aktivisnya kerap sampirkan ke pundak partai- ini di pemilu 1999 lalu yang “hanya” 1.436.563 suara.

lewat aksi para politikusnya di panggung parlemen serta sempat pula di lembaga eksekutif melalui duet Nurmahmudi Ismail dan Suropto sebagai Menteri dan Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan era Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang juga mempesona publik adalah

**Tabel**  
Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Islam  
pada Pemilu 1999 dan 2004

No Partai	Pemilu 1999				Pemilu 2004			
	Jmlh Suara	%dr Total Suara Sah	Jmlh Kursi di DPR	%dr Total Kursi di DPR	Jmlh Suara	%dr Total Suara Sah	Jmlh Kursi di DPR	%dr Total Kursi di DPR
1 PKB	13.336.823	12.62	51	10.2	11.989.564	10.57	52	9.45
2 PPP	11.329.905	10.72	58	11.6	9.248.764	8.15	58	10.55
3 PAN	7.488.956	7.12	34	6.8	7.303.324	6.44	52	9.45
4 PBB	2.069.708	1.94	13	2.6	2.970.487	2.62	11	2.00
5 PKS	1.436.563	1.36	7	1.4	8.325.020	7.34	45	8.18
6 PPNUI	679.178	0.64	5	1.0	895.610	0.79	-	-
7 PBR	-	-	-	-	2.764.998	2.44	13	2.36
8 Lain2	3.417.592	3.21	4	0.8	-	-	-	-
Total	39.758.725	37.61	172	34.4	43.497.767	38.34	231	42.00

#### Keterangan:

Sumber Pengumuman Penetapan Hasil Pemilu Legislatif KPU tanggal 5 Mei 2004. Total jumlah suara sah 113.462.414 dari jumlah pemilih sebanyak 124.449.038. Adapun jumlah pemilih terdaftar pada pemilu 2004 ini adalah 148.000.369 (total penduduk Indonesia 214.187.047). Sedangkan pada pemilu 1999 total suara sah sebanyak 105.846.000.

Ada beberapa catatan yang bisa dikedepankan dalam memaknai hasil perolehan suara PK Sejahtera pada pemilu 2004 ini: *Pertama*, PK Sejahtera sudah teruji baik dalam lima tahun terakhir,

kemampuan dan konsistensi anak-anak partai dakwah ini mempraktikkan bagaimana hidup harmonis di dalam alam demokrasi. Misalkan ekspresi aspirasi melalui demonstrasi yang sepi dari anarkhisme dan dilakukan secara santun sekaligus cerdas pula.

Tokoh otomotif AS, Henry Ford, pernah berkata, “*You can’t build a reputation on what you are going to do*”. Artinya, reputasi tidak bisa dibentuk lewat janji belaka seperti yang dihamburkan para juru kampanye atau lewat guyuran iklan pada masa kampanye. Publik, seperti secara tegas bisa dibaca dari hasil pemilu 2004, mulai kritis dengan menengok



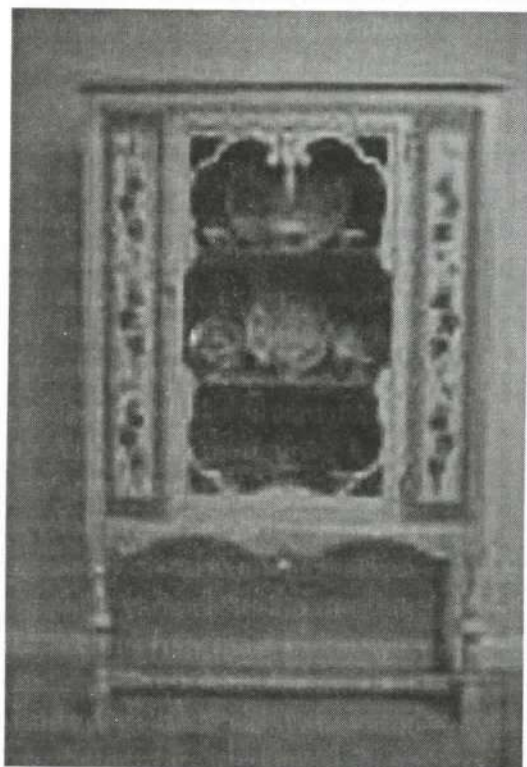
PARTAI KEA  
Ikon Baru Pol  
negara  
ka

“keseharian politik” dari partai politik. Bagi PK Sejahtera, apa yang disebut dengan “keseharian politik” itu ditunjukkan lewat *direct selling*, pos Keluarga Keadilan, santunan korban musibah, dan lain sebagainya yang dilakukan sudah sejak jauh-jauh hari sebelum masa kampanye digelar.

*Kedua*, sebagai akibat proses panjang sebelum pemilu 2004—antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat, konsumsi informasi, serta pendidikan—terbentuk suatu kondisi di mana mayoritas muslim sudah tidak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik, namun lebih peduli pada substansi. Penjelasan yang bisa dikemukakan untuk menjawab fenomena ini adalah, kaum muslimin cenderung lebih peduli untuk menjadikan Islam sebagai etika sosial, lebih mementingkan agar segala urusan kemasyarakatan—termasuk politik—dipengaruhi dan disemangati oleh nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Kesimpulan ini mengemuka, mengingat dalam dua dekade terakhir “Islam kultural” jelas menampakkan perkembangan yang sangat mengesankan di negeri ini. Jadi “ketidakpedulian” mereka pada “Islam struktural” bukan karena mereka menganggap politik tidak penting, melainkan justru karena meningkatnya kesadaran keagamaan mereka pada hal-hal yang jauh lebih penting dari pada simbol.

Itulah yang terlihat pada fenomena kenaikan suara secara mengesankan yang dialami PK Sejahtera pada pemilu kali ini. Para juru kampanye PK Sejahtera tidak

menjual isu yang tema penegakan membahasakan universal sekaligus kekeharian warga yang u. jenuh berada di dalam tero. transisi panjang yang melelahkan u. Misalkan isu KKN, yang menjadi pangkal kebobrokan negeri ini, dikemas dengan tawaran Bersih dan Lebih Peduli. Bahkan tawaran itu tak sekadar wacana, aktivis PK Sejahtera di parlemen membuktikannya dengan menolak pelbagai dana yang tidak jelas asal serta pemanfaatannya. Inilah yang dinilai oleh publik sebagai sebuah alternatif tawaran bagi Indonesia Baru.



... dan masyarakat.<sup>11</sup>  
Adapun tujuan partai yang berasas-  
kan Islam ini adalah mewujudkan bangsa  
Indonesia yang adil dan makmur yang  
diridhai Allah SWT serta mewujudkan  
pemerintahan yang jujur, bersih, dan  
berwibawa. Terdapat sejumlah visi politik  
PK Sejahtera, yakni (1) menjadi unsur  
perekat dan pengarah kesatuan umat dan  
bangsa; (2) Menjadi wadah pendidikan  
politik bagi umat Islam khususnya dan  
bangsa Indonesia umumnya sekaligus  
tangga menuju kepemimpinan nasional;



(3) Menjadi pelopor pengembangan  
kultur pelayanan dalam tradisi politik In-  
donesia; (4) Menjadi dinamisator pembe-  
lajaran bagi bangsa Indonesia; (5) Menja-  
di akselerator bagi terwujudnya masyara-  
kat madani di Indonesia.

Sedangkan misi politiknya adalah: (1)  
Berjuang mewujudkan masyarakat madani  
di Indonesia; (2) Menegakkan eksistensi  
umat Islam di Indonesia; (3) Berjuang  
untuk mewujudkan keadilan dan kesejah-  
teraan bagi seluruh rakyat Indonesia; (4)  
Mengembangkan tradisi profesionalisme  
pengelolaan dalam berbagai bidang  
kehidupan berbangsa dan bernegara; (5)  
Ikut memberikan kontribusi positif bagi  
pengembangan dan kemajuan peradaban  
dunia.

Adapun karakteristik dasar dari PK  
Sejahtera yakni moralitas, profesional,  
patriotik, moderat, demokrat, reformis,  
dan independen. Dalam rangka mencapai  
tujuan normatif tersebut dan memenuhi  
tuntutan atas realitas yang melingkupi  
bangsa Indonesia di tengah-tengah  
percaturan global, maka PK Sejahtera  
memiliki dasar dan pijakan yang kokoh  
dalam setiap gerak dan langkah politik-  
nya, selain agenda yang jelas dalam  
mencapai tujuan-tujuan yang digariskan.  
Dasar dan titik tolak ini selain memuat  
cita-cita normatif, sekaligus juga merupa-  
kan kristalisasi keyakinan atas realitas

<sup>11</sup> Lebih jauh lihat Dr. Nur Mahmudi Ismail, "Jatidiri Partai Keadilan" dalam Sahar L. Hassan *et. al.* (ed.) *Memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 29 – 66.



historis dan harapan masa depan bagi Bangsa Indonesia di tengah perjuangan untuk memakmurkan dirinya dan turut serta sekuat tenaga dalam perjuangan kemakmuran bumi. Dasar dan titik tolak itu antara lain: (1) Keadilan, Persamaan, dan Keseimbangan; (2) Kesatuan Nasional; (3) Kemajuan; (4) Khidamatul Ummah demi Persatuan; dan (5) Kerjasama Internasional.

Lantas bagaimana kita menafsirkan keberadaan PK Sejahtera di tengah-tengah partai-partai Islam lainnya berikut catatan atas platform mereka seperti yang dipaparkan di atas? Jika kita menengok platform partai-partai Islam pada pemilu 1955 lalu, kesan formalistiknya begitu kuat. Antara lain pencantuman keinginan untuk mendirikan negara Islam, asas Islam bagi Indonesia, syari'ah atau undang-undang Islam, dan lain-lain yang menjurus –secara formalistik- ke Islam. Namun di era reformasi ini, aroma semacam di tahun 1955 itu memudar. Hal ini bukan berarti mereka mengabaikan persoalan mendasar, semacam keharusan untuk tunduk dan patuh pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kontekstualisasinya disesuaikan dengan setting Indonesia kontemporer.

Riset yang dilakukan Pusat Penelitian (Puslit) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mempertegas soal inklusifitas partai-partai Islam ini. Walau, menurut hasil riset itu, nama, asas, dan tanda gambar merupakan ciri pembeda, tetapi hal demikian lebih bersifat simbolis atau instrumentalis, dan karenanya tidak cukup signifikan sebagai ukuran dalam menilai status partai Islam di antara sekian banyak partai politik. Karenanya, tujuan dan program setiap partai adalah salah satu kriteria yang juga perlu diperhatikan. Lebih jauh, temuan riset itu menyebutkan:<sup>12</sup>

“Mencermati tujuan dan program setiap partai Islam pasca Orde Baru, seperti yang mudah terbaca dari AD/ART partai, agaknya ada satu fokus perhatian yang selalu tampak. Dari sekian jumlah partai Islam, hampir semuanya mempunyai tujuan dan program yang lebih bersifat fungsional-subtansialistik ketimbang formal legalistik. Dengan kata lain, secara teoritis, program mayoritas partai Islam bukanlah hendak memperjuangkan berdirinya negara Islam, melainkan lebih pada memperjuangkan masuknya nilai-nilai Islam yang relevan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Itulah yang pada akhirnya bisa

<sup>12</sup> Laporan penelitian kerjasama antara Puslit IAIN dan The Asia Foundation ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berhasil mengumpulkan data dari 39 petinggi partai politik Islam yang masuk dalam jajaran pengurus pusat partai. Dari 39 partai yang menjadi responden riset ini, hanya 20 di antaranya yang akhirnya berhak mengikuti pemilu. Sedangkan tentang bagaimana partai-partai Islam ini memandang “negara” dalam perspektif platform mereka lihat Almanak Parpol Indonesia, *op. cit.*

menjelaskan bahwa praktis serangan-serangan ideologis dari kubu di luar Islam, semacam “partai Islam hendak mendirikan negara Islam”, “Piagam Jakarta akan dihidupkan kembali”, dan lain sebagainya tidak mengemuka. Pada sisi lain, di internal partai-partai Islam sendiri, pernyataan panas semacam, “haram memilih partai di luar partai Islam” atau “Jika tidak memilih partai Islam kami maka neraka balasan-nya,” yang pada pemilu 1955 tegas terlihat, kali ini juga nyaris tak dijumpai.<sup>13</sup>

Memperhatikan platform PK Sejahtera, kesan partai-partai Islam di era reformasi untuk mengedepankan dimensi substantivistik memang lebih mengemuka. Atau dengan kata lain, partai Islam yang dahulu sempat dicitrakan eksklusif, kini lebih tampil dengan wajah inklusif. Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan kategorisasi Trikotomi-nya Allan Samson itu, kategori fundamentalisme yang menghendaki pembentukan negara Islam

kini tidak menjadi agenda utama dari partai-partai Islam. Yang justru lebih menonjol terlihat—masih mengikuti Allan Samson—adalah konsepsi yang diajukan kelompok reformis, yang walau tujuan akhirnya adalah kemenangan partai-partai Islam secara formal dalam pemilihan umum, namun berbeda dalam pendekatannya. Bagi kelompok ini, dengan pendekatan reformis ini, maka kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat Islam, dan tidak serta merta harus negara Islam menjadi terbuka lebar. Lebih tegas lagi dapat dilihat dari penilaian Bachtiar Effendy berikut:<sup>14</sup>

“Meskipun formalisme hadir kembali bersamaan dengan lahirnya partai-partai Islam sama sekali tidak menunjukkan eksklusivisme dan parokialisme program atau agenda. Bahkan, di sana-sini sebenarnya telah terjadi kesamaan atau duplikasi agenda antara satu partai dengan partai yang lain. Untuk itu, dalam konteks partai-partai

<sup>13</sup> Bahkan Partai Keadilan, yang tegas menjadikan Islam sebagai dasarnya, menerima keanggotaan non-muslim. Tidak hanya itu, dalam sebuah kampanyenya di pemilu 1999 ia pernah menghadirkan juru kampanye non-muslim dan kepengurusan PK Sejahtera di beberapa DPRa (Dewan Perwakilan Ranting) di Propinsi Papua dipegang oleh kalangan non-muslim. Dalam konteks partisipasi non-muslim di dalam partai politik Islam di era reformasi ini dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, partai Islam eksklusif yang membatasi keanggotaannya hanya pada umat Islam. *Kedua*, partai Islam inklusif yang membuka kesempatan non-muslim menjadi anggota partai. Hanya saja akses untuk menjadi pengurus partai ataupun calon legislatif partai relatif amat terbatas, untuk tidak mengatakan tidak sama sekali. *Ketiga*, partai Islam pluralis yang bukan saja menerima keanggotaan dari non-muslim melainkan juga memberi kesempatan yang sama untuk terlibat baik dalam jajaran pengurus teras partai maupun calon legislatif partai. PAN adalah salah satu contoh konkret partai dalam kategori ini. Dalam penilaian Nurcholil Madjid, seperti dikutip *Suara Karya*, 13 Januari 1999, relitas semacam itu “merupakan suatu kemajuan yang luar biasa yang pada tahun 1950-an tidak terbayangkan dan bisa dianggap kafir.”

<sup>14</sup> Bachtiar Effendy, “Antara Substansialisme dan Formalisme,” dalam *Panji Masyarakat*, No. 40 tahun III. Edisi Khusus Tahun 2000.



Islam dijadikan sebagai asas dan simbol, tidak ada di dalamnya keinginan yang tersirat untuk kembali pada bentuk formalisme masa lampau.”

Jika kembali mengaca pada hasil riset Puslit UIN tadi, sekalipun ada upaya mendamaikan nilai-nilai Islam dengan realitas keindonesiaan yang amat plural ini —yakni dengan tidak mempersoalkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara—, namun pada umumnya, partai-partai Islam itu tetap bersikukuh dengan posisi Al-Qur’an dan Sunnah sebagai, “rujukan sistem politik sekaligus sebagai panduan moral.”<sup>15</sup> Dalam konteks ini dapat difahami jika sejumlah partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan, memiliki lembaga khusus, yakni Dewan Syuro yang berfungsi mengontrol segala tindakan dan kebijakan partai dari perspektif Islam.

### **Positioning PKS Pasca Pemilu 2004**

Lonjakan besar suara PK Sejahtera pada pemilu legislatif kali ini dapat dimaknai sebagai kanalisasi pilihan politik alternatif dari para pemilih rasional dan barisan sakit hati yang dulu berhimpun di pelbagai partai politik. Mereka menye-

rahan suaranya kepada PK Sejahtera karena di sinilah harapan untuk meretas Indonesia Baru tersedia, dan bagi mereka PK Sejahtera sudah terbukti “Bersih dan Lebih Peduli”. Pilihan berkoalisi kepada partai lama, seperti sempat diwartakan oleh pelbagai media massa di mana terdapat sejumlah tokoh PK Sejahtera yang mencoba mengusung Jend (Pur) Wiranto sebagai kandidat presiden dari PK Sejahtera, adalah sebuah investasi ceroboh yang menyeret PK Sejahtera ke dalam jarak sasaran tembak kalangan pro reformasi serta masyarakat luas yang mendambakan perubahan.

Kerisauan ini agaknya ditangkap oleh Majelis Syuro, lembaga tertinggi PK Sejahtera. Musyawarah Majelis Syuro PK Sejahtera ke-4 pada 24 – 25 April 2004 menghasilkan satu keputusan penting: PK Sejahtera berposisi sebagai partai oposisi. Alasan PK Sejahtera untuk mengambil “jalan sepi” ini, seperti diungkap Ketua Umum PK Sejahtera Hidayat Nur Wahid, adalah, “PK Sejahtera akan melaksanakan amanah konstituenya dengan berkonsentrasi pada perjuangan di legislatif secara kritis konstruktif.” Penulis sebut sebagai “jalan

<sup>15</sup> Sekalipun memiliki kesamaan persepsi tentang posisi Al-Qur’an dan Sunnah, para responden terpecah secara seimbang menjadi dua kubu dalam melihat apakah Islam merupakan ideologi politik atau bukan. Di antara responden yang tidak menerima Islam sebagai ideologi politik berpendapat bahwa ajaran Islam sesungguhnya lebih luas dari hanya sekedar ideologi politik. Bagi mereka, dengan menjadikan Islam sebagai ideologi politik sama halnya dengan mengkerdikan arti Islam, yang sebenarnya lebih tinggi dari itu. Lihat Arskal Salim, *op. cit.*, hlm. 43.

sepi" lantaran keputusan Majelis Syuro itu bertentangan secara diametral dengan perangai elite partai politik lain yang justru sibuk merancang jalan menuju tampuk kekuasaan.

Laode Ida menyebut keputusan itu sebagai "Inovasi Politik PKS yang menarik, elegan dan produktif, baik bagi kepentingan perkembangannya sendiri maupun untuk pembangunan politik di Indonesia." Dia menyampaikan tiga argumentasi perihal *positioning* PK Sejahtera pasca pemilu legislatif itu, yakni: <sup>16</sup>

"Pertama, keputusan itu merupakan bagian dari upaya untuk tetap memelihara konsistensi dan citranya dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih. Karena, memberikan dukungan terbuka terhadap figur capres atau cawapres yang masih diragukan atau kontroversial di mata publik hanya akan merugikan citranya sendiri yang sudah dengan susah payah dibangun dalam lima tahun terakhir. Tepatnya, PKS bisa terjebak dalam orientasi perebutan kekuasaan kursi eksekutif, yang sekaligus akan dituduh mulai mengincar materi.

Kedua, dengan memosisikan diri sebagai oposisi, PKS akan memberikan pembelajaran demokrasi bagi para politisi dan masyarakat. Kalau selama ini kita tidak memiliki partai oposisi di parlemen, karena umumnya para politisi hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan di eksekutif, atau walaupun bersikap kritis di parlemen (DPR/DPRD) biasanya para politisinya memiliki

tendensi untuk memperoleh kompensasi politis dan materi dari pihak yang dikritiknya; maka PKS bisa mengembangkan paradigma baru bahwa oposisi memiliki pengaruh yang substantif untuk memberikan arah bagi para pemegang kendali di eksekutif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

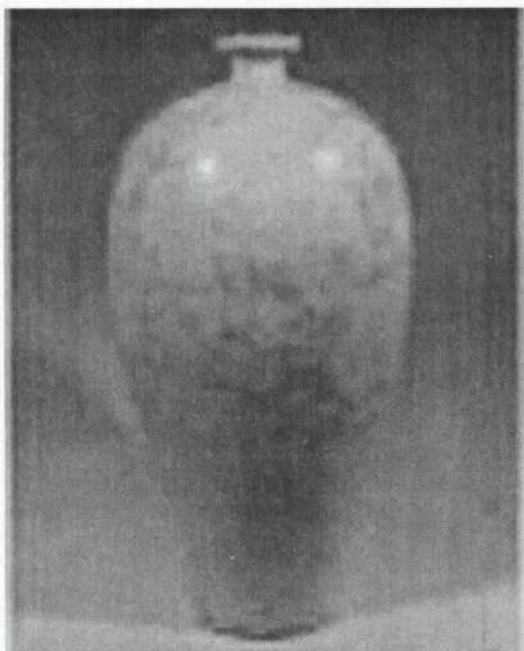
Ketiga, meskipun perolehan suara PKS meningkat dibandingkan lima tahun lalu, secara kuantitatif masih belum signifikan untuk bisa bertarung memperebutkan kursi kekuasaan di eksekutif. PKS hanya menang DKI di Jakarta, itu pun tidak mayoritas. Ini artinya, kalau berkoalisi, PKS hanya dianggap sebagai pendukung atau pelengkap penderita, di mana capres/cawapres yang didukungnya juga belum tentu menang. Atau, walaupun pihak yang didukungnya menjadi pemenang dan kemudian ternyata tak bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka PKS akan terbawa dalam pencitraan negatif pemerintah yang didukungnya itu. Semua ini jelas tak akan menguntungkan bagi PKS yang dimotori oleh kalangan Islam modernis terdidik yang berwatak progresif-demokratis.

Tetapi, kalau PKS berada di luar kekuasaan eksekutif dan menjadi kekuatan oposisi dengan tetap menunjukkan konsistensinya dalam moto "peduli dan bersih", maka itu bisa jelas akan merupakan kampanye positif selama lima tahun ke depan, dan itu memperbesar peluangnya untuk terus menambah perolehan suara dalam pemilu."

Keputusan untuk beroposisi itu juga

<sup>16</sup> *Gatra*, No. 25 tahun X, 8 Mei 2004.





membuktikan PK Sejahtera didirikan tidak untuk kepentingan sempit berjangka pendek. Ketika partai-partai lain berlomba-lomba berkoalisi untuk berbagi kekuasaan, PK Sejahtera menarik diri dari hiruk-pikuk itu untuk berkonsentrasi pada posisi oposisi. Ini adalah sebuah sikap elegan serta strategis, yang tidak hanya menuai simpati publik tapi juga memperlebar kiprah PK Sejahtera dalam menjalankan tiga fungsi parlemen: *controlling*, *legislasi*, dan *budgeting*.

Memang partai politik dibuat dalam

rangka merebut kekuasaan politik. Dan *the real power* itu ada di lembaga eksekutif, dengan kontrol datang dari arah legislatif. Sepanjang yang bisa diamati dari komentar para tokoh nasional serta pengamat dan akademisi perihal PK Sejahtera, ada satu benang merah yang bisa ditarik yaitu bahwa PK Sejahtera adalah partai masa depan. Artinya, ia amat prospektif untuk menjadi partai politik besar di kemudian hari asalkan perkembangannya berjalan secara bertahap. Kasus PDI Perjuangan adalah contoh terbaik sebuah partai politik yang tiba-tiba melambung ke puncak singgasana kekuasaan dengan topangan infrastruktur yang keropos serta kesiapan SDM yang lemah. Buah dari perkembangan PDI Perjuangan yang dikarbit itu didapatkan pada pemilu 2004 kemarin ketika perolehan suaranya anjlok lantaran kinerja negatif yang dipertontonkan kepada publik baik di lembaga eksekutif maupun parlemen. PDI Perjuangan adalah contoh menarik untuk kasus "Bubble Party" –partai yang melesat namun bagai gelembung rentan untuk pecah. Dan keputusan Musyawarah Majelis Syuro PK Sejahtera akhir april 2004 itu adalah salah satu "jalan aman" untuk menghindari sindrom "Bubble Party" tadi. ♦